

CAPAIAN KINERJA BERDASARKAN E-PERFORMANCE KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANTEN TRIWULAN I TAHUN 2021



DATA PERJANJIAN DAN REALISASI KINERJA

TAHUN

UNIT KERJA

PERJANJIAN DAN REALISASI KINERJA TAHUN : 2021 KANTOR WILAYAH BANTEN

NO	SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR KINERJA	CASCADING		TARGET					REALISASI	
				KELUAR	MASUK	WAKTU PENYELESAIAN	JUMLAH	SATUAN	JUMLAH	(%)	URAIAN	
1.	Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Kantor Wilayah yang efektif dan efisien	1	Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah 			3.1 Indeks: Triwulan IV	TW1	0	Indeks	0		Penilaian Indeks akan dilaksanakan pada akhir tahun
							TW2	0	Indeks	0		
							TW3	0	Indeks	0		
							TW4	3.1	Indeks	0		
2.	Terwujudnya layanan administrasi hukum umum di wilayah yang berkepastian hukum	2	Persentase peningkatan PNP Administrasi Hukum Umum di wilayah 			5 Persentase: Triwulan IV	TW1	0		0		Perhitungan Target dilaksanakan pada akhir tahun
							TW2	0		0		
							TW3	0		0		
							TW4	5	Persentase	0		
3.	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas MKNW, MPW dan MPD	3	Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah 			82 Persentase: Triwulan IV	TW1	0	Persentase	0		Belum terdapat laporan pengaduan notaris
							TW2	0	Persentase	0		
							TW3	0	Persentase	0		
							TW4	82	Persentase	0		
4.	Terselenggaranya pelayanan kekayaan intelektual yang berkualitas di kantor wilayah kementerian hukum dan HAM	4	Jumlah permohonan KI yang difasilitasi Kantor Wilayah 			126 Layanan: Triwulan IV	TW1	20	Layanan	34	170	
							TW2	50	Layanan	0		
							TW3	80	Layanan	0		
							TW4	126	Layanan	0		
5.	Terselenggaranya Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang Handal	4	Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah 			1 Lokus: Triwulan IV	TW1	0		0		Tahap perencanaan pelaksanaan diseminasi KI
							TW2	0		0		
							TW3	0		0		
							TW4	1	Lokus	0		
5.	Terselenggaranya Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang Handal	5	Persentase Penanganan Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual 			100 Persentase: Triwulan IV	TW1	0	Persentase	0		Belum terdapat pengaduan pelanggaran KI
							TW2	0	Persentase	0		
							TW3	0	Persentase	0		
							TW4	100	Persentase	0		
5.	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual yang Dilakukan oleh Kantor Wilayah 	5	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual yang Dilakukan oleh Kantor Wilayah 			1 Kegiatan: Triwulan IV	TW1	0		0		Tahap perencanaan kegiatan
							TW2	0		0		
							TW3	0		0		
							TW4	1	Kegiatan	0		
5.	Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah 	5	Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah 			2 Laporan: Triwulan IV	TW1	0		0		Tahap perencanaan kegiatan pemantauan produk KI
							TW2	1	Laporan	0		
							TW3	0		0		
							TW4	1	Laporan	0		
6.	Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah	6	Persentase rancangan perda yang difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kemenkumham 			80 Persentase: Triwulan IV	TW1	80	Persentase	100	125	Keseluruhan Raperda telah terfasilitasi dengan jumlah 47 Raperda
							TW2	80	Persentase	0		
							TW3	80	Persentase	0		
							TW4	80	Persentase	0		

7.	Terselenggaranya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan 	7	1	Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan 			12 Orang; Triwulan IV	TW1	0		0		Tahap perencanaan kegiatan
								TW2	0		0		
								TW3	0		0		
								TW4	12	Orang	0		
8.	Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM 	8	1	Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM 			2 Instansi Pemerintah; Triwulan IV	TW1	0		0		Tahap perencanaan kegiatan
								TW2	0		0		
								TW3	0		0		
								TW4	2	Instansi Pemerintah	0		
		8	2	Jumlah kab/kota peduli HAM 			1 Instansi Pemerintah; Triwulan IV	TW1	0		0		Tahap perencanaan kegiatan
								TW2	0		0		
								TW3	0		0		
								TW4	1	Instansi Pemerintah	0		
		8	3	Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM 			2 Instansi Pemerintah; Triwulan IV	TW1	0		0		Tahap perencanaan kegiatan
								TW2	0		0		
								TW3	0		0		
								TW4	2	Instansi Pemerintah	0		
9.	Meningkatnya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah 	9	1	Tersedianya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah 			3 Rekomendasi; Triwulan IV	TW1	0		0		Terdapat 3 permohonan Yankomas yang masih dalam proses
								TW2	0		0		
								TW3	0		0		
								TW4	3	Rekomendasi	0		
10.	Rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia 	10	1	Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia 			70 Persentase; Triwulan IV	TW1	0		0		Tahap perencanaan kegiatan
								TW2	0		0		
								TW3	0		0		
								TW4	70	Persentase	0		
		10	2	Hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia yang disosialisasikan di wilayah 			1 Buku; Triwulan IV	TW1	0		0		Tahap perencanaan kegiatan
								TW2	0		0		
								TW3	0		0		
								TW4	1	Buku	0		
11.	Terselenggaranya pembinaan hukum di wilayah 	11	1	Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah 			2 Kegiatan; Triwulan IV	TW1	0		0		Tahap perencanaan kegiatan
								TW2	1	Kegiatan	0		
								TW3	0		0		
								TW4	1	Kegiatan	0		
12.	Tenwujudnya kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat di wilayah 	12	1	Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan 			77 Persentase; Triwulan IV	TW1	77	Persentase	100	130	Telah diselesaikan permohonan bantuan hukum litigasi dengan jumlah 145 perkara
								TW2	77	Persentase	0		
								TW3	77	Persentase	0		
								TW4	77	Persentase	0		
		12	2	Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan 			79 Persentase; Triwulan IV	TW1	79	Persentase	100	127	Telah diselesaikan bantuan hukum non litigasi berjumlah 6 kegiatan
								TW2	79	Persentase	0		
								TW3	79	Persentase	0		
								TW4	79	Persentase	0		
		12	3	Indeks kepuasan layanan bantuan hukum 			76,61 Persentase; Triwulan IV	TW1	0	Persentase	0		Penilaian indeks akan dilaksanakan pada triwulan IV
								TW2	0	Persentase	0		
								TW3	0	Persentase	0		
								TW4	76,61	Persentase	0		
		12	4	Persentase desa/keurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah 			70 Persentase; Triwulan IV	TW1	0	Persentase	0		Tahap perencanaan kegiatan
								TW2	0	Persentase	0		
								TW3	0	Persentase	0		
								TW4	70	Persentase	0		

		12	5	Persentase anggota JDHN yang berpartisipasi aktif + ✓ - ✎			20 Persentase: Triwulan IV	TW1	0	Persentase	0		Tahap perencanaan kegiatan
								TW2	10	Persentase	0		
								TW3	0	Persentase	0		
								TW4	20	Persentase	0		
13.	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah ✓	13	1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah + ✓ - ✎			3.15 Indeks: Triwulan IV	TW1	0	Indeks	0		Penilaian indeks akan dilaksanakan pada triwulan IV
								TW2	0	Indeks	0		
								TW3	0	Indeks	0		
								TW4	3.15	Indeks	0		
		13	2	Indeks Kepuasan Internal di Wilayah + ✓ - ✎			3.11 Indeks: Triwulan IV	TW1	0	Indeks	0		Penilaian indeks akan dilaksanakan pada triwulan IV
								TW2	0	Indeks	0		
								TW3	0	Indeks	0		
								TW4	3.11	Indeks	0		
		13	3	Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah + ✓ - ✎			3.11 Indeks: Triwulan IV	TW1	0	Indeks	0		Penilaian indeks akan dilaksanakan pada triwulan IV
								TW2	0	Indeks	0		
								TW3	0	Indeks	0		
								TW4	3.11	Indeks	0		
14.	Tenwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Pemasarakatan yang Berkualitas di Wilayah ✓	14	1	Indeks Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah + ✓ - ✎			80 Indeks: Triwulan IV	TW1	0		0		Penilaian indeks akan dilaksanakan pada triwulan IV
								TW2	0		0		
								TW3	0		0		
								TW4	80	Indeks	0		

Urutkan No